



RENCANA KERJA 2022

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG

JALAN KUTAMAYA NO. 21 – SUMEDANG Telp. 0261-202377

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2014 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Kesehatan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang tahun 2021 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 nantinya. Dimana mengingat kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia

sejak Maret 2020 silam menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh signifikan di aspek kesehatan masyarakat. Sehingga, pelaksanaan program-program bidang kesehatan kini terfokus pada penanganan Covid-19. Covid 19 menuntut untuk melakukan perubahan, baik dalam hal cara berpikir, cara berperilaku, dan cara bekerja. Tantangan selanjutnya adalah cara berpikir dan cara berperilaku yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap ancaman penyakit termasuk dari penyakit hari esok.

Oleh karenanya penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 ini juga mengacu kepada Kebijakan-kebijakan di tingkat Provinsi dan juga nasional, yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Pusat, Renstra Kementerian Kesehatan, SPM nasional bidang kesehatan dan juga rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi di Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor) ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor.....Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor.....);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
33. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 113);
34. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 111);

35. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 66);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022;
- Menyediakan arahan bagi aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2022;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan Sumedang terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2022.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu dalam Rencana SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2021. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2021 Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD

Koding					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun- n-2) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II (Kuantitatif)	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub						Jumlah (Sebelum)	Jumlah (Sesudah)	(PERGESERAN)	
									K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					147.056.422.504	195.527.161.249		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Capaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	100.580.735.304	107.171.385.304		42.862.934.836
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dok perencanaan, penganggran & Evaluasi kinerja	15 Dokumen	248.427.150	248.427.150		
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	6 Dokumen	140.000.000	140.000.000	1 Dokumen (Renja)	29.086.000
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	1 Dokumen (RKA)	2.395.000

1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	1 Dokumen (RKA)	2.395.000
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	0 Dokumen	2.395.000
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	0 Dokumen	-
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	1) 1 Dok (DAK) 2) 1 Dok (Lakip) 3) 1 Dok (LKPJ) 4) 1 Dok (LPPD) 5) 1 Dok (SPM.Mon ev)	68.427.150	68.427.150	1) 1 Dok (DAK) 2) 0 Dok (Lakip) 3) 0 Dok (LKPJ) 4) 0 Dok (LPPD) 5) 1 Dok (SPM.Mon ev)	29.179.000
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen	14 Dokumen	98.524.960.304	105.115.610.304		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah laporan penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS	100%	98.284.960.304	104.875.610.304	11,22%	42.217.181.253
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Verifikasi Keuangan SKPD	100%	180.000.000	180.000.000	11%	36.730.000
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	14 Dokumen	60.000.000	60.000.000	4 Dok	3.675.000
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah dok administrasi kepegawaian	12 Dokumen	71.810.000	71.810.000		
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola	12 Dokumen	41.910.000	41.910.000	3 Dokumen	6.650.000
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	150 org	29.900.000	29.900.000	0 Org	-
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	32 Jenis	462.745.350	462.745.350		

1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	114.674.150	114.674.150	6 Jenis	29.111.050
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 Jenis	80.760.000	80.760.000	3 Jenis	19.200.000
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	9 Jenis	8.691.800	8.691.800	6 Jenis	1.213.550
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16 Jenis	17.158.400	17.158.400	16, 12, 16	5.217.650
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	9 Wilayah	139.631.000	139.631.000	4 Wilayah	10.190.000
1	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah yang dikelola	1 Sistem	101.830.000	101.830.000	0 Sistem	-
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	180.852.500	180.852.500		
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	26.992.500	26.992.500	1 Unit	1.100.000
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan Dinas	1 Jenis	153.860.000	153.860.000	1 Jenis	102.080.000
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	676.000.000	676.000.000		
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	12 Bulan	124.000.000	124.000.000	3 Bulan	45.064.833

1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1) Jumlah Jasa Kebersihan 2) Jumlah Jasa Operator 3) Jumlah Jasa Penegmudi 4) Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan	1) 8 org 2) 12 org 3) 1 org 4) 9 org	552.000.000	552.000.000	1) 6,8,8 org 2) 12,12,12 org 3) 1,1,1 org 4) 8,8,8 org	253.500.000
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah pemeliharaan barang untuk daerah	19 Kali	415.940.000	415.940.000		
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara	12 Paket	152.750.000	152.750.000	9, 8, 5 Unit	66.171.500
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat yang dilepihara	3 Unit	2.290.000	2.290.000	2 Unit	400.000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	2 Paket	250.900.000	250.900.000	0 Paket	-
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Peralatan Rumah Jabatan Dinas yang dipelihara	2 Unit	10.000.000	10.000.000	0 Unit	-
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				35 PKM	58.370.290.368	58.370.290.368	35 PKM	22.973.581.548
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Persentase ketersediaan farmasi, reagen dan perbekalan kesehatan dll	100%	44.991.115.600	82.137.985.345		9.619.066.184
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase ketersediaan kefarmasian dan BMHP	100%	3.648.338.400	15.831.733.145		
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Puskesmas Terenovasi Terehabilitasi	1 Puskesmas	0	1.764.713.206	0 PKM	-
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Jumlah Puskesmas Terenovasi Terehabilitasi	1 Puskesmas	13.065.000	13.065.000	0 PKM	-

1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dana Insentif Daerah; Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1) Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan Sarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya 2) Jumlah Pengadaan Prasarana Puskesmas Melalui Non Afirmasi 3) Jumlah Sarana Dan Prasarana Puskesmas Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Yang Ditingkatkan Kuantitas Dan Kualitasnya	1) 25 Dok 2) 16 Unit 3) 13 Puskesmas	2.107.545.000	5.051.519.700	1) 0 Dok 2) 0 Unit 3) PKM	-
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB		1) Persentase Alat Kesehatan 2) Peresentasi Obat Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Yang Terdistribusi Ke Puskesmas	1) 90 % 2) 100 %	7.960.000	1.645.548.839	1) 0 % 2) 0 %	-
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	233.000.000	0 Paket	-
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik; DBH CHT		1) Jumlah Puskesmas Yang Terdistribusi Obat 2) Peresentasi Obat Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Yang Terdistribusi Ke Puskesmas 3) Persentase Ketersediaan Kefarmasian Dan BMHP 4) Persentase Obat Rusak Dan Obat Kadaluarsa Di UPT Gudang Farmasi Kesehatan	1) 100 % 2) 100 % 3) 100 % 4) 0 %	297.005.000	3.470.655.400	1) 100 % 2) 100 % 3) 100 % 4) 1,1 %	74.764.500
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kefarmasian; DBH CHT		1) Jumlah Cartridge TCM 2) Persentase Ketersediaan Kefarmasian Dan BMHP	1) 1 Paket 2) 100 %	1.222.763.400	3.488.162.000	1) 0 Paket 2) 0,9 %	10.991.050
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	165.069.000	50%	-
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masy	100%	40.292.777.200	64.133.053.200		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK ; DBH CHT	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1) Persentase K4 Dengan 10T 2) Persentase Linakes	1) 100 % 2) 100 %	150.000.000	214.970.000	1) 25,09 % 2) 27,5 %	20.313.325

1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan; DBH CHT	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1)Persentase ibu bersalin ,BBL miskin dan tidak memiliki jaminan yang terlayani 2) Persentase K4 Dengan 10T 3) Persentase Linakes	1) 100 % 2) 100 % 3) 100 %	100.000.000	3.279.016.000	1) 0 % 2) 25,09 % 3) 27,5 %	6.693.050
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DBH CHT	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1) Persentase K4 Dengan 10T 2)Persentase Linakes	1) 100 % 2) 100 %	75.000.000	75.000.000	1) 25,09 % 2) 27,5 %	9.000.000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DBH CHT	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1) Persentase K4 Dengan 10T 2) Persentase Linakes	1) 100 % 2) 100 %	100.000.000	100.000.000	1) 25,09 % 2) 27,5 %	9.328.950
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DBH CHT	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1) Persentase Anak Kelas 1-7 Dan 10 Mendapat Screening Kesehatan 2) Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita 3) Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1) 100 % 2) 100 % 3) 100 %	75.000.000	75.000.000	1) 0 % 2) 26 % 3) 29 %	19.665.000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK ; DBH CHT		1) Persentase Anak Kelas 1-7 Dan 10 Mendapat Screening Kesehatan 2) Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita 3) Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1) 100 % 2) 100 % 3) 100 %	119.500.000	135.274.700	1) 0 % 2) 26 % 3) 29 %	4.620.000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Skrining Lansia		0	75.030.000	8,15 %	-
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DBH CHT		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	150.495.000	150.495.000	77,50%	-
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DBH CHT	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penderita DM Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%	118.034.000	118.034.000	10,37%	-
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	DBH CHT	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penderita ODGJ Berat Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%	200.000.000	200.000.000	32,20%	8.658.000

1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	DBH CHT	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kesembuhan TB; CDR TB	100%	175.000.000	175.000.000	53%	19.450.000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	DBH CHT	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kasus HIV Yang Diobati	100%	175.000.000	175.000.000	1,5%	-
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (DAK Non Fisik)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0	803.605.200	0%	-
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK ; Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1) Persentase peran lintas sektor dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting 2) Jumlah Puskesmas melaksanakan Surveilans Gizi Aktif 3) Persentase keluarga Balita Stunting mendapat pendampingan		0	940.813.175	1) 0 % 2) 17,14 % 3) 100 %	-
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK Non Fisik)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK ; Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0	153.900.100	0	-
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK ; Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; DBH CHT	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1) Jumlah UPT yang melakukan Analisis pengendalian dampak lingkungan dan manajemen faktor resiko lingkungan 2) Persentase 5 pilar STBM 3) Persentase lingkungan permukiman sehat 4) Persentase Pengawasan Tempat Pengelolaan Pestisida dan fasilitas makanan minuman aman 5) Persentase Puskesmas yang melaksanakan UKL UPL 6) Persentase Puskesmas yang mengelola limbah medis Padat 7) Persentase Tempat - Tempat Umum sehat	1) 20 Unit 2) 80 % 3) 80 % 4) 80 % 5) 25 % 6) 100 % 7) 80 %	683.990.000	880.085.375	1) 0 Unit 2) 47,7 % 3) 83,50 % 4) 50,91 % 5) 31,43 % 6) 100 % 7) 62,47 %	39.446.950
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0	515.747.450	0%	-
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					0	14.890.000	0%	-
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; DBH CHT		1) Persentase Anak Usia 0- 11 Bulan Yg Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap 2) Presentase Hasil Pemeriksaan Jemaah Haji (3 Bulan Sebelum Operasional)	1) 100 % 2) 100 %	750.000.000	800.000.000	1) 4547 org 2) 0 %	84.507.000

	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					9.525.000	0%	-	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DBH CHT	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1) Angka Kesembuhan TB; CDR TB; Deteksi Dini Hepatitis B Pada Bumil; Penemuan Kasus Diare Semua Umur; Penemuan Kasus Pnemonia Pada Balita; Proporsi Penemuan Kasus Kusta Cacat Tk 2;Cakupan POPM Kecacingan; Insident Rate DBD; Persentase Kasus HIV Yang Diobati; Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyakit Menular; Jumlah Puskesmas Yang Dibina Untuk Melakukan Tata Laksana Teknis Sesuai Standar 2) Persentase Usia 15-59 Yg Mendapat Screening PTM; Persentase Penderita Hypertensi Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar; Persentase Penderita ODGJ Berat Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar; Persentase Penderita DM Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1) 100 % 2) 100 %	931.971.000	931.971.000	Hepatitis 10,97% 9%,1,54 %;0%,0% 1,44%); Pneumoni a (9,42) DBD (0,01, 100%) ; 35 Puskesmas (100%)	195.802.500,0
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi; Dana Insentif Daerah		1) Persentase Peserta Jamkesda Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Kesehatan Daerah Yang Mendapat Pelayanan Pada FKTP Dan FKTL 2) Persentase Peserta JKN PBI APBD Provinsi (Jamkesda Terintegrasi JKN) Pada FKTP 3) Persentase Peserta JKN Yang Mendapatkan Premi PBI APBD Kabupaten (Jamkesda Terintegrasi JKN),Persentase Capaian KBK Dan Dokumen Fraud Program JKN Pada FKTP	1) 100 % 2) 100 % 3) 100 %	34.638.787.200	42.412.361.200	1) 0,088 % 2) 86,54 % 3) 0,088 %	8.578.364.327,0
1	02	02	2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	DBH CHT		Persentase PPK BLUD Memiliki IKM Kategori Baik	85%	200.000.000	200.000.000	0%	12.283.400,0
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						2.871.607.080	0%	-
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; DBH CHT		Peningkatan Jumlah Jenis Pemeriksaan Labkesling	75 Jenis	200.000.000	8.247.830.000	0%	5.955.132,0
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik)	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas				0	1.223.920.000	0%	-

1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						81.360.000	0%	-
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						9.150.000	0%	-
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB; DBH CHT	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1) Jumlah Ambulans 2) Persentase pelayanan kesehatan Gawat Darurat Medis Pra Fasilitas Kesehatan	1 Unit 100 %	1.450.000.000	2.250.000.000	50% (3 Keg)	519.223.000,0
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	550.000.000	555.000.000		
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	DBH CHT		Jumlah Puskesmas Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Online	35 PKM	150.000.000	150.000.000	35 PKM	32.125.250
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK ; DBH CHT		Jumlah Puskesmas Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Online	35 PKM	200.000.000	205.000.000	35 PKM	40.800.000
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	DBH CHT		Jumlah Puskesmas Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Online	36 PKM	200.000.000	200.000.000	36 PKM	6.543.000
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Persentase pelayanan kesehatan Gawat Darurat Medis Pra Fasilitas Kesehatan	100%	500.000.000	1.618.199.000		
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	DAK Non Fisik- BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	97.415.000	0%	-
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK ; DBH CHT	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Dasar Pemerintah	100%	500.000.000	1.520.784.000	34,92% (41)	101.955.000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Persentase sarana kesehatan yang terakreditasi, Persentase Tenaga Kesehatan yang Tersertifikasi	100% 100%	500.000.000	4.697.140.000		38.150.000
1	02	03	2,02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						3.520.000.000	0%	0
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah SDM Terstandar	250 Org	500.000.000	4.697.140.000		

1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; DBH CHT		Jumlah SDM Terstandar	250 Org	500.000.000	4.697.140.000	0 org	38.150.000
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			Persentase ketersediaan farmasi, reagen dan perbekalan kesehatan Persentase ketersediaan Alkes	100% 90%	357.140.000	442.590.000		55.773.400
1	02	04	2.01		<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>			<i>Persentase Institusi Yang Dilakukan Pengawasan Atas Resiko Obat Dan Perbekes (Puskesmas Dan Apotek)</i>	100%	357.140.000	357.140.000		
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	DBH CHT		Persentase Institusi Yang Dilakukan Pengawasan Atas Resiko Obat Dan Perbekes (Puskesmas Dan Apotek)	100%	357.140.000	357.140.000	22,1%	55.773.400
1	02	04	2.06		<i>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>					0	85.450.000		
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	DAK Non Fisik- BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan		Pemeriksaan makanan 12 sampel, Pemberian sampel pemeriksaan sarana		0	85.450.000	20 Sarana (10%)	0
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Cakupan Desa Siaga Aktif	100%	627.431.600	1.078.060.600		104.160.350
1	02	05	2.01		<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			<i>Persentase Forum Desa Siaga Aktif</i>	100%	277.431.600	728.060.600		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; DBH CHT		1) Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri 2) Persentase Forum Desa Siaga Aktif	1) 50 % 2) 100 %	277.431.600	728.060.600	1) 6,5 % 2) 100 %	78.499.600
1	02	05	2.02		<i>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			<i>Persentase Forum Desa Siaga Aktif</i>	100%	200.000.000	200.000.000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	DBH CHT		1) Jumlah Kelompok Yang Melaksanakan Germas 2) Persentase PHBS Pada Rumah Tangga	1) 60 % 2) 100 %	200.000.000	200.000.000	1) 26,6 % 2) 51,14 %	21.139.500
1	02	05	2.03		<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			<i>Persentase Posyandu Mandiri; Persentase UKBM Yang Dikelola</i>	1) 40 % 2) 100 %	150.000.000	150.000.000		
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DBHCHT		Persentase Posyandu Mandiri; Persentase UKBM Yang Dikelola	1) 40 % 2) 100 %	150.000.000	150.000.000	20,3%	4.521.250

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara.

Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakannya, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk:

1. Menjamin tersedianya barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhannya;
2. Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UU Nomor 23

Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan *concurrent* (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Enam urusan tersebut adalah:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. SPM sekurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indikator apakah kinerja Kepala Daerah dinilai baik atau tidak dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23 tahun 2014 maka ada konsekuensi tertentu atas tercapai/tidaknya indikator-indikator ini.

SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting*. UU 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemda untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298). Kedepannya nanti pengalokasian DAK ke daerah akan berdasar pada kemampuan daerah untuk pencapaian target-target SPM, daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Hal-hal tersebut di atas membuat seluruh elemen akan bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.

Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang sampai saat ini masih bermasalah dengan adanya defisit anggaran. Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif – preventif sehingga diharapkan akan ber-impact pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana penyusunan RKPD Tahun 2020/21 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah

tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial serta beberapa prioritas lainnya.

Konsep SPM berubah dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja Pemda yang memiliki konsekuensi *reward* dan *punishment*, sehingga Pemda diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan.

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

SPM merupakan salah satu program strategis nasional. Pada Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.

- a. SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
- b. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
- c. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- d. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- e. Setiap anak pada usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
- f. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;

- g. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
- h. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- i. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- j. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- k. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan
- l. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanankesehatan ibu hamil	100%		89	72,48	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%		100	78,34	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%		100	82,30	
4	Pelayanan kesehatan balita	100%		88	78,05	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%		98.82	95,19	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%		95.70	32,15	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%		100	71,27	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%		91.40	24,07	
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%		96.14	85,80	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%		94.55	72,41	
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%		100	22,97	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%		63	16,44	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Perumusan isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten

Sumedang periode 2019-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang periode 2019-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

No	Aspek	Permasalahan
1	Kesehatan Masyarakat	1.Masih belum optimalnya pengendalian dampak lingkungan dan manajemen faktor resiko lingkungan;
		2. Belum optimalnya pengelolaan limbah medis (padat dan cair)
		3.Belum optimalnya pengawasan tempat pengelolaan pestisida, fasilitas makanan dan minuman;
		4.Belum optimalnya pembinaan hygiene dan sanitasi terhadap tempat-tempat umum;
		5.Belum optimalnya pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat;
		6.Belum optimalnya pembinaan upaya kesehatan olahraga;
		7.Belum optimalnya pembinaan upaya kesehatan kerja;
		8.Masih tingginya jumlah kematian ibu dan bayi;
		9.Belum optimalnya penanganan kasus resiko tinggi dan komplikasi ibu dan anak;
		10.Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan ibu dan anak, gizi dan lansia;
		11.Masih rendahnya penjangkauan kesehatan ibu, anak usia sekolah dan lansia;
		12.Belum optimalnya sistem rujukan kasus kebidanan dan neonatal;
		13.Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan KIA dan Gizi;
		14.Masih tingginya kasus kehamilan tidak diinginkan, anemia, kurang energi kronis, berat bayi lahir rendah;
		15.Masih tingginya kasus stunting;
		16.Belum optimalnya pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
		17.Belum optimalnya pembinaan pada desa siaga aktif;
		18.Belum optimalnya penerapan kawasan tanpa rokok di lima tatanan (kawasan pendidikan, kesehatan, tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak, fasilitas kesehatan);
		19.Belum optimalnya pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat;

No	Aspek	Permasalahan
2	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.Masih kurangnya regulasi yang mengatur penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa;
		2.Belum optimalnya sistem rujukan;
		3.Kurangnya kualitas pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
		4.Masih belum optimalnya kualitas penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa;
		5.Belum optimalnya penjangkaran kesehatan jiwa di masyarakat;
		6.Belum optimalnya penjangkaran faktor resiko penyakit tidak menular di masyarakat usia 15 tahun ke atas;
		7.Belum optimalnya sarana pendukung sistem pencatatan dan pelaporan program penyakit tidak menular dari klinik swasta;
		8.Belum optimalnya penjangkaran penyakit tidak menular berbasis masyarakat;
		9.Belum optimalnya pembinaan penyakit tidak menular berbasis masyarakat;
		10.Masih terjadinya keterlambatan distribusi vaksin dan kelengkapannya;
		11.Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana/KLB;
		12.Rendahnya kesadaran calon jemaah haji untuk memeriksakan kesehatan;
		13.Masih rendahnya angka kesembuhan atau cure rate penderita TB;
		14.Masih rendahnya case notification rate (CNR TB);
		15.Masih rendahnya persentase skrining orang dengan resiko HIV;
		16.Masih rendahnya persentase kasus HIV yang diobati;
		17.Masih rendahnya persentase deteksi dini hepatitis B pada Bumil;
		18.Masih rendahnya pengobatan diare dan pnemonia sesuai standar;
		19.Masih tingginya proporsi penemuan kusta cacat tingkat 2;
		20.Masih tingginya insiden rate DBD;
		21.Tingginya potensi angka kecacingan (stunting-anemia);
3	Pelayanan Kesehatan	1.Sebagian puskesmas belum memiliki izin operasional;
		2.Belum optimalnya integrasi program indonesia sehat melalui pendekatan keluarga dengan intervensi perawatan kesehatan masyarakat;
		3.Belum optimalnya pembinaan terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar pemerintah, swasta, dan kesehatan tradisional,

No	Aspek	Permasalahan
		4.Masih kurangnya kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dasar pemerintah, swasta, dan kesehatan tradisional;
		5.Sebagian besar penyehat tradisional masih belum memiliki surat terdaftar penyehat tradisional;
		6.Belum adanya regulasi daerah untuk PIS-PK, penyehat tradisional dan kasus insidentil, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, serta sistem rujukan terpadu;
		7.Sebagian besar tukang gigi belum memiliki izin;
		8.Persentase puskesmas yang terakreditasi belum mencapai target;
		9.Belum adanya klinik pratama yang terakreditasi;
		10.Belum adanya praktek dokter dan dokter gigi yang terakreditasi;
		11.Masih rendahnya nilai dari survei kepuasan masyarakat;
		12.belum optimalnya sistem rujukan berjenjang yang berbasis kompetensi;
		13.Belum optimalnya sistem penanggulangan gawat darurat terpadu;
4	Sumberdaya Kesehatan	1.Belum optimalnya penyediaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai;
		2.Belum optimalnya penyediaan alat kesehatan untuk UPT Puskesmas dan Lab Kesehatan Daerah;
		3.Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas alat kesehatan;
		4.Belum optimalnya pembinaan pengelolaan pelayanan kefarmasian di UPT Pemerintah dan Swasta;
		5.Belum terlaksana pembinaan usaha mikro obat tradisional;
		6.Belum terlaksananya pembinaan toko alat kesehatan;
		7.Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
		8.Belum optimalnya pendayagunaan tenaga kesehatan yang berkualitas;
		9.Masyarakat Kabupaten Sumedang belum seluruhnya terlindungi oleh jaminan kesehatan nasional;
		10.Belum optimalnya pembinaan terhadap Fasilitas kesehatan pertama pemerintah maupun swasta yang berkerja sama dengan BPJS dalam program JKN Nasional;
		11.Masih kurangnya penyebaran informasi pelaksanaan JKN;
		12.Belum optimalnya kinerja pelayanan FKTP berbasis kapitasi;
		13.Masih belum optimalnya pembayaran premi JKN PBI APBD;
		14.Masih belum optimalnya jaminan pelayanan kesehatan masyarakat

No	Aspek	Permasalahan
		miskin;
		15.Belum optimalnya pelaksanaan PPK BLUD Puskesmas dan Lab kesehatan daerah;
		16.Masih kurangnya regulasi yang mengatur pelaksanaan PPK BLUD Puskesmas dan Lab kesehatan daerah;
		17.Masih lemahnya akurasi data masyarakat miskin yang mendapat jaminan pelayanan;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang Rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan. Rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang tahun 2022, dapat dilihat pada tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang .

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							171.950.318.005				206,510,540,610			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							89.787.648.310				89,787,648,310			
1	2	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							360.000.000				360,000,000			
1	02	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Dokumen	4 Laporan	150.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	150,000,000	
					Penyusunan Ranwal Renja,Renja, Perubahan Renja, Renstra, Perubahan Renstra, Forum SKPD														
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	4 Laporan	30.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	30,000,000	
					Penyusunan RKA SKPD, Penyusunan Perubahan RKA SKPD														
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	4 Laporan	30.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 Persen	30,000,000	

						Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		Daerah							Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		
						Penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Perubahan DPA SKPD											
1	0 2	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 Laporan	4 Laporan	150.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	150,000,000
					LKIP												
					LKPJ												
					LPPD												
					Monev Ikhtisar Realisasi Anggaran												
					SPIP												
					Monev DAK												
					Laporan Dalbang												
					RB ZI												
					Roadshow SAKIP												
1	2	1	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								87.546.504.310				87,546,504,310
1	0 2	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	3 Laporan	87.271.504.310	PENDAPAT A N ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	87,271,504,310
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
1	0 2	0 1	2.0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	3 Laporan	200.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	200,000,000

					Penatausahaan (Verifikasi Pengajuan Pencairan dan SPJ)													
1	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD dan Laporan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	19 Laporan	3 Laporan	75.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	75,000,000
					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/Akhir Tahun SKPD													
1	2	1	2,0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								50.000.000					50,000,000
1	0	0	2.0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	2 Laporan	25.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	25,000,000
					Pengelolaan Data Kepegawaian													
1	0	0	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	15 Orang	2 Laporan	25.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	25,000,000
					Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah (Bimtek)													
1	2	1	2,0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah								606.394.000					606,394,000
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	6 Laporan	104.933.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	104,933,000
					Barang-Barang Habis Pakai dan Tidak Perlu Pemeliharaan (ATK, Materai, Alat-alat Listrik, dan sejenisnya)													
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	6 Laporan	50.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	50,000,000
					Penyediaan Mamin, Air Galon, Makanan Khas, dan sejenisnya													

1	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	6 Laporan	15.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	15,000,000
					Penyediaan Cetak dan penggandaan (Cetak Buku, Cetak Photo, ID Card, Photocopy, dan sejenisnya)													
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	6 Laporan	20.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	20,000,000
					Pembelian surat kabar, buku, dan sejenisnya													
1	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	6 Laporan	139.631.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	139,631,000
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Daerah)													
1	0	0	2.0	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	6 Laporan	276.830.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	276,830,000
					Dukungan Happy Digital Region (Mini Command Center, dan sejenisnya)													
1	2	1	2,0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								176.000.000					176,000,000
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Unit	2 Laporan	76.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	76,000,000
					Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Komputer, Laptop, Printer, AC, Drone, Kamera dan sejenisnya)													
1	0	0	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	2 Laporan	100.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100,000,000

						Usuran Pemerintah Daerah yang memadai		Daerah									yang memadai		
						Pembangunan Mushola, Garasi, Gazebo, Kolam, Pagar Kantor, TPT Kantor, Ruang Rapat, Partisi, Toilet, Penataan Halaman, dan sejenisnya													
1	2	1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							676.000.000					676,000,000		
1	0 2	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	2 Laporan	124.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	124,000,000	
					Pembayaran langganan air, telpon, listrik, internet														
1	0 2	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	2 Laporan	552.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	552,000,000	
					Honorarium Operator, Jasa Kebersihan, Jasa Pengamanan, Jasa Pengemudi, Instruktur Senam, dan sejenisnya														
1	2	1	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							372.750.000					372,750,000		
1	0 2	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	4 Laporan	152.750.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	152,750,000	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, pembayaran STNK (Kendaraan Roda 2 dan 4 untuk Ess 2 s.d Staf)														
1	0 2	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	4 Laporan	10.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	10,000,000	

						memadai												
						Jasa Service Komputer, Laptop, Printer, AC, Drone, Kamera dan sejenisnya												
1	0 2	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	4 Laporan	200.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	200,000,000
					Jasa Pemeliharaan Rumah Jabatan, Rumah Dinas, Gedung Kantor, dan sejenisnya													
1	0 2	0 1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	4 Laporan	10.000.000	PENDAPAT A N ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	10,000,000
					Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Mushola, Garasi, Gazebo, Kolam, Pagar Kantor, TPT, Ruang Rapat, Toilet, dan sejenisnya)													
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								78.967.669.695					112,517,892,300
1	2	2	2,0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								77.867.669.695					57,919,892,300
1	0 2	0 2	2.0 1	0 2	Pembangunan Puskesmas	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang dibangun baru	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar	Puskesmas Sukasari.Darma raja. Sukamantri. Tanjungmedar. Conggeang	25 Persen	5 Paket	25 Persen	25.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	11,005,687,200
					Pembangunan Puskesmas													
1	0 2	0 2	2.0 1	0 3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas Pembantu dan bangunan PSC yang dibangun	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	31 Unit	25 Persen	14.000.000.000	DBH CHT Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	6,000,000,000
					Pembangunan Pustu						30 Unit		9.000.000.000					

					pembangunan gedung PSC						1 Unit		5.000.000.000					
1	0 2	0 2	2.0 1	0 9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar	Puskesmas Ganeas, Surian, Tanjungkerta, Jatininggal, Wado	25 Persen	5 Paket	25 Persen	10.000.000.000	DBH CHT Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	8,350,000,000
					Rehab Puskesmas								10.000.000.000					
1	0 2	0 2	2.0 1	1 0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab Jumlah rumah dinas yang direhab	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	15 unit 30 Unit	25 Persen	9.000.000.000	DBH CHT Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	1,300,000,000
					Rehab Pustu				15 Pustu Di Wilayah Kerja Puskesmas				3.000.000.000					
					Pemeliharaan Rumah dinas				30 Rumah Dinas Di Wilayah Kerja Puskesmas				6.000.000.000					
1	0 2	0 2	2.0 1	1 3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	34 unit	25 Persen	3.100.000.000	DBH CHT Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	3,080,000,000
					Pengadaan Kendaraan Distribusi Vaksin				UPTD Farmasi		1 Unit		700.000.000					
					Pengadaan Pusling				Puskesmas Tanjungmedar, Paseh dan Tanjungkerta		3 Unit		1.500.000.000					
					Pengadaan Roda dua				Dinas Kesehatan dan Puskesmas		30 Unit		900.000.000					
1	0 2	0 2	2.0 1	1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik untuk Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap mampu Poned	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	3 Paket	25 Persen	12.397.669.695	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	7,000,000,000
					Pengadaan Alkes APBD								11.596.479.695					
					Pengadaan Alkes MTQ								301.190.000					

					HIBAH								500.000.000					
1	0	0	2.0	1	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Alat Kalibrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	36 Set	25 Persen	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	733,000,000
1	0	0	2.0	1	Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah pengadaan obat untuk fasilitas Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	2 Paket	25 Persen	2.020.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	7,000,000,000
					Pengadaan Obat APBD								2.000.000.000					
					Pengadaan Obat MTQ								20.000.000					
1	0	0	2.0	1	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah pengadaan BHP di fasilitas Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	1 Paket	25 Persen	1.500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	2,500,000,000
1	0	0	2.0	1	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Ambulance atau Pusling yang dilakukan pemeliharaan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	40 buah	25 Persen	350.000.000	DBH CHT Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	800,000,000
					Pemeliharaan pusling dan ambulance													
1	2	2	2,0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								52.157.037.200					53,148,000,000
1	0	0	2.0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Ibu Hamil	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	4 Laporan	25 Persen	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	350,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas													
1	0	0	2.0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	13 Laporan	25 Persen	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	775,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas													

1	0 2	0 2	2.0 2	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	6 Laporan	25 Persen	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	200,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas													
1	0 2	0 2	2.0 2	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelola Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	9 Laporan	25 Persen	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	650,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas													
1	0 2	0 2	2.0 2	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelola Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	12 Laporan	25 Persen	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	400,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas													
1	0 2	0 2	2.0 2	0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	4 Laporan	25 Persen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	200,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas													
1	0 2	0 2	2.0 2	0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	7 Laporan	25 Persen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	200,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas													
1	0 2	0 2	2.0 2	0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	3 Laporan	25 Persen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	200,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas													
1	0 2	0 2	2.0 2	0 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	3 Laporan	25 Persen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	200,000,000

								Pelayanan Sesuai Standar	Kelurahan					Alokasi Umum				
						Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas												
1	0	0	2.0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	3 Laporan	25 Persen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	300,000,000
						Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas												
1	0	0	2.0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	3 Laporan	25 Persen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	350,000,000
						Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas												
1	0	0	2.0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	3 Laporan	25 Persen	700.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	500,000,000
						HIBAH (KPA)							500.000.000					
1	0	0	2.0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	14 Laporan	25 Persen	2.000.000.000	DBH CHT Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	3,888,000,000
						Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas												
1	0	0	2.0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	6 Laporan	25 Persen	200000000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	425,000,000
						Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas												
1	0	0	2.0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	7 laporan	25 Persen	950.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	3,350,000,000

					PIK								25.000.000					
1	0	0	2.0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	3 laporan	25 Persen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	185,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas													
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	7 laporan	25 Persen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	400,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas													
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	2 laporan	25 Persen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	25,000,000
					MTQ								243.250.000					
1	0	0	2.0	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	3 laporan	25 Persen	1.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	800,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas													
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	2 laporan	25 Persen	38.438.787.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	30,150,000,000
					Pembayaran Premi													
1	0	0	2.0	2	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Urusan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	1 dokumen	25 Persen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	300,000,000

					Pembinaa pertemuan lintas Sektoral													
1	0 2	0 2	2.0 2	3 0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Tersedia Layanan Telemedicine	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	11 Puskesmas	25 Persen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	150,000,000
					Konsultasi Jarak Jauh (Digital)													
1	0 2	0 2	2.0 2	3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang melakukan pelayanan sesuai standar	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	4 Rumah Sakit	25 Persen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	175,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas													
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan sesuai standar Jumlah Puskesmas yang memiliki ijin operasional Jumlah Puskesmas yang mengelola kegiatan PIS-PK	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	35 Puskesmas 35 Puskesmas 35 Puskesmas	25 Persen	950.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	950,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas													
1	0 2	0 2	2.0 2	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya melakukan pelayanan sesuai standar	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	90 Faskes	25 Persen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	325,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas													
1	0 2	0 2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Laporan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	1 laporan	25 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	50,000,000
					Observasi Pasien Kipi													
1	0 2	0 2	2.0 2	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	1 laporan	25 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	150,000,000
					Penanggulangan KLB													

1	0	0	2.0	3	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	1 laporan	25 Persen	3.500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	3,500,000,000
					Pengelolaan kegawat daruratan dan pengelolaan Sistem Rujukan terintegrasi (SISRUTE)													
1	2	2	2,0 3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								900.000.000				950,000,000	
1	0	0	2.0	0	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Data Informasi Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang sudah menyelenggarakan SIK terintegrasi	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	1 dokumen	25 Persen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	150,000,000
					Pengolahan Data Informasi Kesehatan													
1	0	0	2.0	0	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah UPTD Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Online	Persentase fasilitas kesehatan yang sudah menyelenggarakan SIK terintegrasi	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	36 UPTD	25 Persen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	300,000,000
					Pengelolaan Aplikasi													
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah pengadaan alat/perangkat pendukung SIK	Persentase fasilitas kesehatan yang sudah menyelenggarakan SIK terintegrasi	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	10 unit	25 Persen	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	500,000,000
					Pengadaan Perangkat SIK													
1	2	2	2,0 4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								200.000.000				500,000,000	
1	0	0	2.0	0	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar Cakupan Puskesmas terakreditasi Utama	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan Jumlah Laporan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase Penerbitan Rekomendasi Permohonan Ijin	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	91 Poin 12 Laporan 1 Laporan	100 Persen	200.000.000	DBH CHT		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar Cakupan Puskesmas terakreditasi Utama	25 Persen 25 Persen	400,000,000
					Survey Kepuasan Masyarakat													
1	0	0	2.0	0	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar Cakupan	Jumlah dokumen persiapan dan laporan pelaksanaan Rujukan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Permohonan Ijin	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	43 Dokumen	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar Cakupan Puskesmas	25 Persen 25 Persen	100,000,000

						Puskesmas terakreditasi Utama								Umum		terakreditasi Utama		
						Monitoring dan Pengawasan rumah Sakit												
1	2	3				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							1.575.000.000					1,950,000,000
1	2	3	2,0 1			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota							100.000.000					195,000,000
1	0 2	0 3	2.0 1	0 1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	Jumlah Pengendalian Perijinan Tenaga Kesehatan	Persentase ijin praktek tenaga kesehatan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Persen	1 laporan	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	60 Persen	45,000,000
					Pengawasan izin praktek													
1	0 2	0 3	2.0 1	0 2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin praktek dilakukan pembinaan dan pengawasan	Persentase ijin praktek tenaga kesehatan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Persen	1750 orang	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	60 Persen	150,000,000
					Pengawasan izin praktek													
1	2	3	2,0 2			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							125.000.000					185,000,000
1	0 2	0 3	2.0 2	0 1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	Jumlah dokumen perencanaan dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standard	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Persen	2 dokumen	60 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	60 Persen	35,000,000
					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Distribusi SDM kesehatan													
1	0 2	0 3	2.0 2	0 3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	Jumlah UPTD yang Dapat Pembinaan	Persentase ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standard	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Persen	37 UPTD	60 Persen	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	60 Persen	150,000,000
					Pembinaan Sumber daya kesehatan													
1	2	3	2,0 3			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1.350.000.000					1,570,000,000
1	0 2	0 3	2.0 3	0 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	Persentase Tenaga Kesehatan yang Profesional dan memenuhi standard	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Persen	210 Orang	12 Persen	1.350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	60 Persen	1,570,000,000

									kompetensi							Umum					
						Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)															
1	2	4				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									550.000.000					655,000,000	
1	2	4	2,0 1			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									150.000.000					130,000,000	
1	0 2	0 4	2.0 1	0 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Jumlah perizinan yang dilakukan tindak lanjut pengendalian dan pengawasan	Persentase Layanan Pengelolaan Obat Publik yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	150 rekomendasi	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	100 Persen	60,000,000			
					Monitoring dan Pengawasan																
1	0 2	0 4	2.0 1	0 2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Data perizinan yang dikelola dan tersedia	Persentase Layanan Pengelolaan Obat Publik yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	60 rekomendasi	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	100 Persen	25,000,000			
					Pengolahan dan Input Data Perizinan																
1	0 2	0 4	2.0 1	0 3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Layanan Pengelolaan Obat Publik yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 laporan	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	100 Persen	45,000,000			
					Survey Perizinan, Rapat Koordinasi dan Monitoring																
1	0 2	0 4	2.0 3		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									100.000.000					150,000,000		
1	0 2	0 4	2.0 3	0 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Jumlah IRT yang Dikendalikan dan Diawasi Jumlah Laporan	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Produksi Pangan Rumah Tangga Yang Memiliki Sertifikat	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	150 rekomendasi	100 Persen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	100 Persen	150,000,000			

					Visitasi perjanjian													
1	2	4	2,0 4		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								100.000.000					105,000,000
1	0 2	0 4	2.0 4	0 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Hignine Sanitasi yang Terkendali dan Terawasi	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	105 sertifikat	100 Persen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	100 Persen	105,000,000
					Pembinaan dan pertemuan													
1	2	4	2,0 5		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								100.000.000					70,000,000
1	0 2	0 4	2.0 5	0 1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Penjaja makanan dan sentra makanan jajanan yang mendapatkan pembinaan	Persentase Sentra Makanan Jajanan Yang Memiliki Stiker Pembinaan Setelah Dilakukan Pembinaan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	350 Penjaja makanan	100 Persen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	100 Persen	70,000,000
					Pembinaan dan pertemuan													
1	2	4	2,0 6		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								100.000.000					200,000,000
1	0 2	0 4	2.0 6	0 1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Jumlah sampel makanan yang diperiksa	Persentase Produk Makanan dan Minuman Yang Diperiksa Dan Memenuhi Syarat	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	75 sampel	100 Persen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	100 Persen	200,000,000
					Pemeriksaan Produk Makanan													
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								1.070.000.000					1,600,000,000
1	2	5	2,0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								500.000.000					850,000,000
1	0 2	0 5	2.0 1	0 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	Jumlah promosi kesehatan yang dilakukan dalam gedung Puskesmas	Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif Yang dibina	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	3 Laporan	100 Persen	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	20 Persen	850,000,000
					Pembinaan Petugas Promkes Puskesmas dan penyuluhan luar gedung													

1	2	5	2,0 2		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								320.000.000					600,000,000
1	0 2	0 5	2.0 2	0 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	Jumlah Kelompok Germas yang dibentuk Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga Sehat	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	22 kelompok 12 Laporan	60 Persen	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	20 Persen	600,000,000
					Penyuluhan dan advoksi kesehatan													
					MTQ								20.000.000					
1	2	5	2,0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								250.000.000					150,000,000
1	0 2	0 5	2.0 3	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	Jumlah Posyandu yang mendapatkan pembinaan strata mandiri	Persentase Posyandu Strata Mandiri	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	750 posyandu	45.70 Persen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	20 Persen	150,000,000
					Pembinaan dan monitoring ke Posyandu													
TOTAL													171.950.318.005					

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam kaidah perencanaan pembangunan, penyusunan perencanaan tidak saja didasarkan pada mekanisme top down, akan tetapi juga melalui mekanisme buttom up. Proses perencanaan melalui mekanisme buttom up dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi sampai pada tingkat nasional. Mekanisme ini didasarkan pada undang-undang perencanaan pembangunan yang ada.

Proses perencanaan pembangunan kesejahteraan Kesehatan merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah, yang disusun berdasarkan mekanisme bottum up melalui musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD serta musrenbang tingkat kabupaten dan provinsi juga musrenbang tingkat nasional.

Dalam musrenbang tingkat desa pemangku-pemangku kepentingan seperti LMD, Tokoh masyarakat, agama, pemuda secara aktif memberikan masukan serta usulan kebutuhan program/kegiatan untuk pembangunan kesejahteraan Kesehatan masyarakat desa.Demikian juga ditingkat kecamatan, kabupaten serta provinsi. Karena dalam pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Sumedang selalu menghadirkan pemangku-pemangku kepentingan yang ada.

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang.

2.5 Tabel Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO	KECAMATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU
1.	TOMO	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa Cipeles Kec. Tomo	1 Desa	25.000.000,00
JUMLAH					25.000.000,00

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

Hal itu disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak," seperti tertulis dalam Perpres tersebut. Untuk agenda pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan," kata Perpres itu. RPJMN 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (Nawa Cita) Presiden, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus dan fokus kegiatan, kesehatan, pembangunan kesehatan

RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional. Selain itu, menurut Perpres tersebut, RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sementara Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang secara substantif bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian sosial tahun 2015-2019.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Adapun arah kebijakan nasional maupun provinsi Jawa Barat mengenai Urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional/Provinsi Jawa Barat

NO	KEBIJAKAN NASIONAL / PROVINSI		SUMBER	KETERANGAN
A	Nasional			
	1	Meningkatkan Kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	RPJMN	Program Prioritas Nawacita no.5
	2	Program Indonesia Sehat (Paradigma Sehat, Pelayanan Kesehatan dan JKN)	RPJMN	Program Prioritas Nawacita no.5
	3	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer (<i>primary health care</i>) 2. Penerapan pendekatan keberkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (<i>continuum of care</i>) 3. Intervensi berbasis resiko kesehatan (<i>health risk</i>)	KEMENKES	ARAH KEBIJAKAN KEMENKES 2015-2019
B	Provinsi			
	1	Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Masyarakat	RPJMD Prov.Jabar	SASARAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023

Adapun keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan Dokumen Perencanaan lainnya disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Renstra Dinkes dengan Dokumen Perencanaan lainnya

KEMENTRIAN KESEHATAN		DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT		DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG	
URUSAN KESEHATAN					
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAK AN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)	Meningkat kan Kesehat an Masyara kat	Meningkatkan Kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing	Mening katkan Kualitas Pemerataan Pelayan an Kesehat an	Menyelenggara n pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan	Meningkatkan kualitas dan kualitas tenaga kesehatan
Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care).	Meningkat kan Pengendalian Penyakit	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan		Memfasilitasi akreditasi tenaga kesehatan	
Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan	Meningkat kan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan	meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif		Memenuhi jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan standar pelayanan	
	Meningkat kan Jumlah, Jenis, Kualitas Dan Pemerataan Tenaga Kesehatan			Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
	Meningkat kan Akses, Kemandirian dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan			Memfasilitasi akreditasi unit pelayanan kesehatan	
				Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar pelayanan	
				Meningkatkan kesadaran masyarakat (individu-keluarga-corporate)	Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat

				terhadap pola hidup sehat	
				Meningkatkan penjarangan dan pembinaan terhadap penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit menular-tidak menular
				Mendorong dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjawab tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang merumuskan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sumedang terpilih untuk Periode 2019-2023 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023. Adapun Visi dari Kepala Daerah terpilih yaitu ***“Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023”***.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kepala Daerah terpilih menetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;

Untuk Mendukung Visi Kepala Daerah Kabupaten Sumedang terpilih periode tahun 2019-2023 sesuai tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang mempunyai keterkaitan dengan Misi ke -1 (satu) Kepala Daerah terpilih yaitu *“Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat”*.

Adapun program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan , yang dicanangkan untuk mendukung Misi ke- 1 (satu) Pemerintah Daerah tersebut adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

3.2.1. Tujuan

Dalam mempercepat tercapainya Misi ke-1 (satu) Kepala Daerah terpilih periode tahun 2019-2023, Maka tujuan pembangunan dari pada Dinas Kesehatan, yaitu :

- a. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Rahayu Dan Mendorong Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat Melalui Gempita Tahun 2023;

3.2.2. Sasaran

Untuk mendukung tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang , maka sasaran untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga Kesehatan serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang murah, mudah dan responsif dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						171.950.318.005		206,510,540,610	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						89.787.648.310		89,787,648,310	
1	2	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						360.000.000		360,000,000	
1	02	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen	6 Dokumen	4 Laporan	150.000.000	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	100 Persen	150,000,000
					Penyusunan Ranwal Renja,Renja, Perubahan Renja, Renstra, Perubahan Renstra, Forum SKPD									
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 Persen	2 Dokumen	4 Laporan	30.000.000	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	100 Persen	30,000,000
					Penyusunan RKA SKPD, Penyusunan Perubahan RKA SKPD									
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Persen	2 Dokumen	4 Laporan	30.000.000	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	100 Persen	30,000,000
					Penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Perubahan DPA SKPD									
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Persen	25 Laporan	4 Laporan	150.000.000	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	100 Persen	150,000,000

					LKIP,LKPI,LPPD,MONEV,SPIP,MO NEV DAK,LAP DALBANG,RB ZIRODSHOW SAKIP									
1	2	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						87.546.504.310			87,546,504,310
1	02	01	2.02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	12 Laporan	3 Laporan	87.271.504.310	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang- undangan	100 Persen	87,271,504,310
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
1	02	01	2.02	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Persen	12 Laporan	3 Laporan	200.000.000	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang- undangan	100 Persen	200,000,000
					Penatausahaan (Verifikasi Pengajuan Pencairan dan SPJ)									
1	02	01	2.02	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran/Akhir Tahun SKPD dan Laporan Tanggapan Pemeriksaan	100 Persen	19 Laporan	3 Laporan	75.000.000	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang- undangan	100 Persen	75,000,000
					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/Akhir Tahun SKPD									
1	2	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000			50,000,000
1	02	01	2.05	0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	12 Laporan	2 Laporan	25.000.000	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	25,000,000
					Pengelolaan Data Kepegawaian									
1	02	01	2.05	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Persen	15 Orang	2 Laporan	25.000.000	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	25,000,000
					Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah (Bimtek)									
1	2	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						606.394.000			606,394,000
1	02	01	2.06	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	12 Laporan	6 Laporan	104.933.000	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	104,933,000
					Barang-Barang Habis Pakai dan Tidak Perlu Pemeliharaan (ATK, Materai, Alat-alat Listrik, dan sejenisnya)									

1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 Persen	12 Laporan	6 Laporan	50.000.000	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	50,000,000
					Penyediaan Mamin, Air Galon, Makanan Khas, dan sejenisnya									
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 Persen	12 Laporan	6 Laporan	15.000.000	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	15,000,000
					Penyediaan Cetak dan penggandaan (Cetak Buku, Cetak Photo, ID Card, Photocpy, dan sejenisnya)									
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 Persen	12 Laporan	6 Laporan	20.000.000	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	20,000,000
					Pembelian surat kabar, buku, dan sejenisnya									
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	12 Laporan	6 Laporan	139.631.000	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	139,631,000
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Daerah)									
1	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 Persen	1 Laporan	6 Laporan	276.830.000	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	276,830,000
					Dukungan Happy Digital Region (Mini Command Center, dan sejenisnya)									
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						176.000.000			176,000,000
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Persen	10 Unit	2 Laporan	76.000.000	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	76,000,000
					Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Komputer, Laptop, Printer, AC, Drone, Kamera dan sejenisnya)									
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Persen	1 Unit	2 Laporan	100.000.000	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	100,000,000
					Pembangunan Mushola, Garasi, Gazebo, Kolam, Pagar Kantor, TPT Kantor, Ruang Rapat, Partisi, Toilet, Penataan Halaman, dan sejenisnya									
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						676.000.000			676,000,000

1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	100 Persen	12 Laporan	2 Laporan	124.000.000	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	124,000,000
					Pembayaran langganan air, telpon, listrik, internet									
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persen	12 Laporan	2 Laporan	552.000.000	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	552,000,000
					Honorarium Operator, Jasa Kebersihan, Jasa Pengamanan, Jasa Pengemudi, Instruktur Senam, dan sejenisnya									
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						372.750.000			372,750,000
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 Persen	12 Laporan	4 Laporan	152.750.000	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	152,750,000
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, pembayaran STNK (Kendaraan Roda 2 dan 4 untuk Ess 2 s.d Staf)									
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Persen	12 Laporan	4 Laporan	10.000.000	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	10,000,000
					Jasa Service Komputer, Laptop, Printer, AC, Drone, Kamera dan sejenisnya									
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 Persen	1 Laporan	4 Laporan	200.000.000	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	200,000,000
					Jasa Pemeliharaan Rumah Jabatan, Rumah Dinas, Gedung Kantor, dan sejenisnya									
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Persen	1 Laporan	4 Laporan	10.000.000	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	10,000,000
					Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Mushola, Garasi, Gazebo, Kolam, Pagur Kantor, TPT, Ruang Rapat, Toilet, dan sejenisnya)									
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						78.967.669.695			112,517,892,300
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						77.867.669.695			57,919,892,300

1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang dibangun baru	25 Persen	5 Paket	25 Persen	25.000.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	11,005,687,200
					Pembangunan Puskesmas									
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas Pembantu dan bangunan PSC yang dibangun	25 Persen	31 Unit	25 Persen	14.000.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	6,000,000,000
					Pembangunan Pustu				30 Unit		9.000.000.000			
					pembangunan gedung PSC				1 Unit		5.000.000.000			
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	25 Persen	5 Paket	25 Persen	10.000.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	8,350,000,000
					Rehab Puskesmas						10.000.000.000			
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab Jumlah rumah dinas yang direhab	25 Persen	15 unit 30 Unit	25 Persen	9.000.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	1,300,000,000
					Rehab Pustu						3.000.000.000			
					Pemeliharaan Rumah dinas						6.000.000.000			
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25 Persen	34 unit	25 Persen	3.100.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	3,080,000,000
					Pengadaan Kendaraan Distribusi Vaksin				1 Unit		700.000.000			
					Pengadaan Pusling				3 Unit		1.500.000.000			
					Pengadaan Roda dua				30 Unit		900.000.000			
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik untuk Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap mampu Poned	25 Persen	3 Paket	25 Persen	12.397.669.695	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	7,000,000,000
					Pengadaan Alkes APBD						11.596.479.695			
					Pengadaan Alkes MTQ						301.190.000			

					HIBAH						500.000.000			
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Alat Kalibrasi	25 Persen	36 Set	25 Persen	500.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	733,000,000
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah pengadaan obat untuk fasilitas Kesehatan	25 Persen	2 Paket	25 Persen	2.020.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	7,000,000,000
					Pengadaan Obat APBD						2.000.000.000			
					Pengadaan Obat MTQ						20.000.000			
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah pengadaan BHP di fasilitas Kesehatan	25 Persen	1 Paket	25 Persen	1.500.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	2,500,000,000
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Ambulance atau Pusling yang dilakukan pemeliharaan	25 Persen	40 buah	25 Persen	350.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	800,000,000
					Pemeliharaan pusling dan ambulance									
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						52.157.037.200			53,148,000,000
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Ibu Hamil	25 Persen	4 Laporan	25 Persen	400.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	350,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25 Persen	13 Laporan	25 Persen	350.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	775,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	25 Persen	6 Laporan	25 Persen	350.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	200,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelola Pelayanan Kesehatan Balita	25 Persen	9 Laporan	25 Persen	400.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	650,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelola Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	25 Persen	12 Laporan	25 Persen	300.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	400,000,000

					Pembinaan, pelatihan dan Money Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25 Persen	4 Laporan	25 Persen	200.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	200,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Money Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25 Persen	7 Laporan	25 Persen	200.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	200,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Money Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25 Persen	3 Laporan	25 Persen	200.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	200,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Money Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	25 Persen	3 Laporan	25 Persen	200.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	200,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Money Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	25 Persen	3 Laporan	25 Persen	250.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	300,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Money Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	25 Persen	3 Laporan	25 Persen	200.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	350,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Money Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25 Persen	3 Laporan	25 Persen	700.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	500,000,000
					HIBAH (KPA)						500.000.000			
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	25 Persen	14 Laporan	25 Persen	2.000.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	3,888,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Money Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25 Persen	6 Laporan	25 Persen	200000000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	425,000,000

					Pembinaan, pelatihan dan Money Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25 Persen	7 laporan	25 Persen	950.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	3,350,000,000
					PIK						25.000.000			
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	25 Persen	3 laporan	25 Persen	200.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	185,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Money Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Surveillance Kesehatan	25 Persen	7 laporan	25 Persen	200.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	400,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Money Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	25 Persen	2 laporan	25 Persen	150.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	25,000,000
					MTQ						243.250.000			
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25 Persen	3 laporan	25 Persen	1.000.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	800,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Money Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25 Persen	2 laporan	25 Persen	38.438.787.200	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	30,150,000,000
					Pembayaran Premi									
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Urusan Kesehatan	25 Persen	1 dokumen	25 Persen	100.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	300,000,000
					Pembinaa pertemuan lintas Sektoral									
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Tersedia Layanan Telemedicine	25 Persen	11 Puskesmas	25 Persen	100.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	150,000,000
					Konsultasi Jarak Jauh (Digital)									

1	02	02	2.02	3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang melakukan pelayanan sesuai standar	25 Persen	4 Rumah Sakit	25 Persen	100.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	175,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan sesuai standar Jumlah Puskesmas yang memiliki ijin operasional Jumlah Puskesmas yang mengelola kegiatan PIS-PK	25 Persen	35 Puskesmas 35 Puskesmas 35 Puskesmas	25 Persen	950.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	950,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya melakukan pelayanan sesuai standar	25 Persen	90 Faskes	25 Persen	150.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	325,000,000
					Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas									
1	02	02	2.02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Laporan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	25 Persen	1 laporan	25 Persen	50.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	50,000,000
					Observasi Pasien Kipi									
1	02	02	2.02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	25 Persen	1 laporan	25 Persen	50.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	150,000,000
					Penanggulangan KLB									
1	02	02	2.02	3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	25 Persen	1 laporan	25 Persen	3.500.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	3,500,000,000
					Pengelolaan kegawat daruratan dan pengelolaan Sistem Rujukan terintegrasi (SISRUTE)									
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						900.000.000			950,000,000
1	02	02	2.03	0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Data Informasi Kesehatan	25 Persen	1 dokumen	25 Persen	150.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	150,000,000
					Pengolahan Data Informasi Kesehatan									
1	02	02	2.03	0 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah UPTD Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Online	25 Persen	36 UPTD	25 Persen	250.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	300,000,000

					Pengelolaan Aplikasi									
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Jumlah pengadaan alat/perangkat pendukung SIK	25 Persen	10 unit	25 Persen	500.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25 Persen	500,000,000
					Pengadaan Perangkat SIK									
1	2	2	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000			500,000,000
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar Cakupan Puskesmas terakreditasi Utama	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan Jumlah Laporan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	25 Persen	91 Poin 12 Laporan 1 Laporan	100 Persen	200.000.000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar Cakupan Puskesmas terakreditasi Utama	25 Persen 25 Persen	400,000,000
					Survey Kepuasan Masyarakat									
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar Cakupan Puskesmas terakreditasi Utama	Jumlah dokumen persiapan dan laporan pelaksanaan Rujukan	25 Persen	43 Dokumen	100 Persen	100,000,000	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar Cakupan Puskesmas terakreditasi Utama	25 Persen 25 Persen	100,000,000
					Monitoring dan Pengawasan rumah Sakit									
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1.575.000.000			1,950,000,000
1	2	3	2,01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						100.000.000			195,000,000
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	Jumlah Pengendalian Perijinan Tenaga Kesehatan	60 Persen	1 laporan	100 Persen	50.000.000	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	60 Persen	45,000,000
					Pengawasan izin praktek									
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin praktek dilakukan pembinaan dan pengawasan	60 Persen	1750 orang	100 Persen	50.000.000	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	60 Persen	150,000,000
					Pengawasan izin praktek									
1	2	3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						125.000.000			185,000,000
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	Jumlah dokumen perencanaan dan distribusi tenaga kesehatan	60 Persen	2 dokumen	60 Persen	50.000.000	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	60 Persen	35,000,000

					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Distribusi SDM kesehatan									
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	Jumlah UPTD yang Dapat Pembinaan	60 Persen	37 UPTD	60 Persen	75.000.000	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	60 Persen	150,000,000
					Pembinaan Sumber daya kesehatan									
1	2	3	2,03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.350.000.000			1,570,000,000
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	Jumlah SDMK yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	60 Persen	210 Orang	12 Persen	1.350.000.000	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	60 Persen	1,570,000,000
					Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)									
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						550.000.000			655,000,000
1	2	4	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						150.000.000			130,000,000
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Jumlah perizinan yang dilakukan tindak lanjut pengendalian dan pengawasan	100 Persen	150 rekomendasi	100 Persen	50.000.000	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	100 Persen	60,000,000
					Monitoring dan Pengawasan									
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Data perizinan yang dikelola dan tersedia	100 Persen	60 rekomendasi	100 Persen	50.000.000	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	100 Persen	25,000,000
					Pengolahan dan Input Data Perizinan									
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 Persen	1 laporan	100 Persen	50.000.000	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	100 Persen	45,000,000
					Survey Perizinan, Rapat Koordinasi dan Monitoring									
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						100.000.000			150,000,000

1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Jumlah IRTP yang Dikendalikan dan Diawasi Jumlah Laporan	100 Persen	150 rekomendasi	100 Persen	100.000.000	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	100 Persen	150,000,000
					Visitasi perijinan									
1	2	4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						100.000.000			105,000,000
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Hignine Sanitasi yang Terkendali dan Terawasi	100 Persen	105 sertifikat	100 Persen	100.000.000	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	100 Persen	105,000,000
					Pembinaan dan pertemuan									
1	2	4	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						100.000.000			70,000,000
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Penjaja makanan dan sentra makanan jajanan yang mendapatkan pembinaan	100 Persen	350 Penjaja makanan	100 Persen	100.000.000	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	100 Persen	70,000,000
					Pembinaan dan pertemuan									
1	2	4	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						100.000.000			200,000,000
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Jumlah sampel makanan yang diperiksa	100 Persen	75 sampel	100 Persen	100.000.000	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	100 Persen	200,000,000
					Pemeriksaan Produk Makanan									
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.070.000.000			1,600,000,000
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000			850,000,000
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	Jumlah promosi kesehatan yang dilakukan dalam gedung Puskesmas	20 Persen	3 Laporan	100 Persen	500.000.000	Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	20 Persen	850,000,000

					Pembinaan Petugas Promkes Puskesmas dan penyuluhan luar gedung									
1	2	5	2,02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						320.000.000			600,000,000
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	Jumlah Kelompok Germas yang dibentuk Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	20 Persen	22 kelompok 12 Laporan	60 Persen	300.000.000	Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	20 Persen	600,000,000
					Penyuluhan dan advoksi kesehatan									
					MTQ						20.000.000			
1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000			150,000,000
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	Jumlah Posyandu yang mendapatkan pembinaan strata mandiri	20 Persen	750 posyandu	45.70 Persen	250.000.000	Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	20 Persen	150,000,000
					Pembinaan dan monitoring ke Posyandu									
TOTAL											171.950.318.005			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL 4.1

Rencana program / Kegiatan Prioritas Daerah tahun 2022

(Terlampir Format RKPD hasil input SIPD)

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Sumedang

Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
															Nasional	Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						628,285,825,614								206,510,540,610			
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	Persen		Persen	100 Persen	89,787,648,310						100 Persen	89,787,648,310				
1	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	35 Laporan	360,000,000						35 Laporan	360,000,000				
1	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			6 Dokumen	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinas	6 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan			
1	02	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinas	2 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan			
1	02	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinas	2 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan			
1	02	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan			25 Laporan	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinas	25 Laporan	150,000,000	Dinas Kesehatan			
1	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	87,546,504,310						12 Laporan	87,546,504,310				
1	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan			12 Laporan	87,271,504,310	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinkes	12 Laporan	87,271,504,310	Dinas Kesehatan			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Sumedang

Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan			12 Laporan	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinkes	12 Laporan	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD dan Laporan Tanggapan Pemeriksaan	19 Laporan			19 Laporan	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinkes	19 Laporan	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	50,000,000						12 Laporan	50,000,000	
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan			12 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinas	12 Laporan	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			15 Orang	25,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinas	15 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	606,394,000						12 Laporan	606,394,000	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan			12 Laporan	104,933,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinkes	12 Laporan	104,933,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Laporan			12 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinkes	12 Laporan	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Laporan			12 Laporan	15,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinkes	12 Laporan	15,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Laporan			12 Laporan	20,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinkes	12 Laporan	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	139,631,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinkes	12 Laporan	139,631,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	276,830,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinkes	1 Laporan	276,830,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	11 Laporan	176,000,000						11 Laporan	176,000,000	
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit			10 Unit	76,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinas	10 Unit	76,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit			1 Unit	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinas	1 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	24 Laporan	676,000,000						24 Laporan	676,000,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Laporan			12 Laporan	124,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinkes	12 Laporan	124,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Sumedang

Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan			12 Laporan	552,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinkes	12 Laporan	552,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	372,750,000						4 Laporan	372,750,000	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Laporan			12 Laporan	152,750,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinas	12 Laporan	152,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Laporan			12 Laporan	10,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinas	12 Laporan	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Laporan			1 Laporan	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinas	1 Laporan	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Laporan			1 Laporan	10,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pegawai Dinas	1 Laporan	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Persen		Persen	25 Persen	534,286,495,854						25 Persen	112,517,892,300	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar	Persen		Persen	25 Persen	448,594,880,704						25 Persen	57,919,892,300	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit yang dibangun	1 Paket			1 Paket	300,000,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Mekarasih	[DANA KHUSUS] - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun baru	9 Paket			9 Paket	31,540,000,000	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	9 Paket	11,005,687,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu dan bangunan PSC yang dibangun	31 Unit			31 Unit	14,000,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - DBH CHT [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	31 Unit	6,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Renovasi puskesmas	5 Paket			5 Paket	15,000,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	5 Paket	10,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Renovasi Labkesda	1 Paket			1 Paket	3,000,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	9 Paket			9 Paket	19,112,950,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - DBH CHT [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	9 Paket	8,350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab Jumlah rumah dinas yang direhab	15 unit 30 Unit			15 unit 30 Unit	9,000,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - DBH CHT [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	15 unit 30 Unit	1,300,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	40 unit			40 unit	6,700,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - DBH CHT [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	40 unit	3,080,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik untuk Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap mampu Poned	30 Paket			30 Paket	23,925,077,151	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar [DANA KHUSUS] - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	30 Paket	7,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kalibrasi	36 Set			36 Set	733,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	36 Set	733,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah pengadaan obat untuk fasilitas Kesehatan	2 Paket			2 Paket	9,506,999,953	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	2 Paket	7,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah paket pengadaan obat untuk fasilitas Kesehatan	5 Paket			5 Paket	15,575,648,500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar [DANA KHUSUS] - DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	5 Paket	2,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ambulance atau Pusling yang dilakukan pemeliharaan	40 buah			40 buah	350,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - DBH CHT [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	40 buah	800,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Laporan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Laporan			12 Laporan	151,205,100	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	12 Laporan	151,205,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Persen		Persen	25 Persen	83,782,551,250						25 Persen	53,148,000,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Ibu Hamil	4 Laporan			4 Laporan	464,970,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	4 Laporan	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13 Laporan			13 Laporan	4,350,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB - Jaminan Persalinan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	13 Laporan	775,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6 Laporan			6 Laporan	350,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	6 Laporan	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Pengelola Pelayanan Kesehatan Balita	9 Laporan			9 Laporan	400,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	9 Laporan	650,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Pengelola Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	12 Laporan			12 Laporan	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	12 Laporan	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4 Laporan			4 Laporan	215,774,700	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	4 Laporan	200,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Sumedang

Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7 Laporan			7 Laporan	275,030,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	7 Laporan	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3 Laporan			3 Laporan	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	3 Laporan	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3 Laporan			3 Laporan	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	3 Laporan	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3 Laporan			3 Laporan	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	3 Laporan	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3 Laporan			3 Laporan	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	3 Laporan	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3 Laporan			3 Laporan	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	3 Laporan	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14 Laporan			14 Laporan	4,344,813,175	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - DBH CHT [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	14 Laporan	3,888,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Laporan			6 Laporan	353,900,100	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	6 Laporan	425,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 laporan			7 laporan	1,119,565,375	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	7 laporan	3,350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	3 laporan			3 laporan	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	3 laporan	185,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Surveillance Kesehatan	7 laporan			7 laporan	1,003,605,200	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	7 laporan	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	2 laporan			2 laporan	393,250,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	2 laporan	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 laporan			3 laporan	1,000,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	3 laporan	800,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarkat	2 laporan			2 laporan	57,961,642,700	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	2 laporan	30,150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Urusan Kesehatan	1 dokumen			1 dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	1 dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Tersedia Layanan Telemedicine	11 Puskesmas			11 Puskesmas	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	11 Puskesmas	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang melakukan pelayanan sesuai standar	4 Rumah Sakit			4 Rumah Sakit	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	4 Rumah Sakit	175,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan sesuai standar Jumlah Puskesmas yang memiliki ijin operasional Jumlah Puskesmas yang mengelola kegiatan PIS- PK	35 Puskesmas 35 Puskesmas 35 Puskesmas			35 Puskesmas 35 Puskesmas 35 Puskesmas	950,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	35 Puskesmas 35 Puskesmas 35 Puskesmas	950,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya melakukan pelayanan sesuai standar	90 Faskes			90 Faskes	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	90 Faskes	325,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah UPT Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan yang terakreditasi	36 UPTD			36 UPTD	5,000,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	36 UPTD	4,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan			1 laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	1 laporan	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 laporan			1 laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	1 laporan	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 laporan			1 laporan	3,500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	1 laporan	3,500,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase faslitas kesehatan yang sudah menyelenggarakan SIK terintegrasi	Persen		Persen	25 Persen	1,581,063,900					25 Persen	950,000,000		
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Data Informasi Kesehatan	1 dokumen			1 dokumen	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas	1 dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah UPTD Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Online	36 UPTD			36 UPTD	268,863,900	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas	36 UPTD	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah pengadaan alat/perangkat pendukung SIK	10 unit			10 unit	1,162,200,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas	10 unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Rekomendasi Permohonan Ijin	Persen		Persen	100 Persen	328,000,000					100 Persen	500,000,000		
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan Jumlah Laporan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	91 Poin 12 Laporan 1 Laporan			91 Poin 12 Laporan 1 Laporan	228,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - DBH CHT [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	91 Poin 12 Laporan 1 Laporan	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen persiapan dan laporan pelaksanaan Rujukan	43 Dokumen			43 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Puskesmas dan Masyarakat	43 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	Persen		Persen	60 Persen	1,575,000,000					60 Persen	1,950,000,000		
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ijin praktek tenaga kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	100,000,000					100 Persen	195,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Sumedang

Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Pengendalian Perijinan Tenaga Kesehatan	1 laporan			1 laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Tenaga Kesehatan	1 laporan	45,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin praktek dilakukan pembinaan dan pengawasan	1750 orang			1750 orang	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Tenaga Kesehatan	1750 orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentasi ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standard	Persen		Persen	60 Persen	125,000,000					60 Persen	185,000,000		
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan dan distribusi tenaga kesehatan	2 dokumen			2 dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Tenaga Kesehatan Puskesmas	2 dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah UPTD yang Dapat Pembinaan	37 UPTD			37 UPTD	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Tenaga Kesehatan Puskesmas	37 UPTD	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Profesional dan memenuhi standard kompetensi	Persen		Persen	60 Persen	1,350,000,000					60 Persen	1,570,000,000		
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMk yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	210 Orang			210 Orang	1,350,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Tenaga Kesehatan	210 Orang	1,570,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Persen		Persen	100 Persen	1,050,934,000					100 Persen	655,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Sumedang

Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Layanan Pengelolaan Obat Publik yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	150,000,000					100 Persen	130,000,000		
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah perizinan yang dilakukan tindak lanjut pengendalian dan pengawasan	150 rekomend asi			150 rekomend asi	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	150 rekomend asi	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Data perizinan yang dikelola dan tersedia	60 rekomend asi			60 rekomend asi	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60 rekomend asi	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 laporan			1 laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 laporan	45,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Produksi Pangan Rumah Tangga Yang Memiliki Sertifikat	Persen		Persen	100 Persen	600,934,000						100 Persen	150,000,000	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah IRT yang Dikendalikan dan Diawasi Jumlah Laporan	150 rekomend asi 12 Laporan			150 rekomend asi 12 Laporan	600,934,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Industri Rumah Tangga	150 rekomend asi 12 Laporan	150,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higne Sanitasi	Persen		Persen	100 Persen	100,000,000					100 Persen	105,000,000		
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Hignine Sanitasi yang Terkendali dan Terawasi	105 sertifikat			105 sertifikat	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	105 sertifikat	105,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Sentra Makanan Jajanan Yang Memiliki Stiker Pembinaan Setelah Dilakukan Pembinaan	Persen		Persen	100 Persen	100,000,000					100 Persen	70,000,000		
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penjaja makanan dan sentra makanan jajanan yang mendapatkan pembinaan	350 Penjaja makanan			350 Penjaja makanan	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Pedagang Makanan Jajanan	350 Penjaja makanan	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan dan Minuman Yang Diperiksa Dan Memenuhi Syarat	Persen		Persen	100 Persen	100,000,000					100 Persen	200,000,000		
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah sampel makanan yang diperiksa	75 sampel			75 sampel	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga	75 sampel	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	Persen		Persen	20 Persen	1,585,747,450					20 Persen	1,600,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif Yang dibina	Persen		Persen	100 Persen	500,000,000					100 Persen	850,000,000		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah promosi kesehatan yang dilakukan dalam gedung Puskesmas	3 Laporan			3 Laporan	500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	3 Laporan	850,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga sehat	Persen		Persen	100 Persen	835,747,450					100 Persen	600,000,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kelompok Germas yang dibentuk Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	22 kelompok 12 Laporan			22 kelompok 12 Laporan	835,747,450	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	22 kelompok 12 Laporan	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Strata Mandiri Persentase Posyandu Strata Mandiri	Persen Persen		Persen Persen	45.70 Persen 100 Persen	250,000,000					45.70 Persen 100 Persen	150,000,000		
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Posyandu yang mendapatkan pembinaan strata mandiri	750 posyandu			750 posyandu	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pelayanan Dasar	Posyandu	750 posyandu	150,000,000	Dinas Kesehatan
TOTAL											628,285,825,614							206,510,540,610	

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2022 menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program kegiatan Dinas Kesehatan, dalam mendukung visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang.

Sehubungan hal tersebut dalam program ini, Kaidah – kaidah pelaksanaannya meliputi :

- a. Penyusunan rencana kerja dengan sebaik-baiknya, serta stakeholder OPD berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen rencana kerja.
- b. OPD berkewajiban menyusun rencana kerja setiap tahun.
- c. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan.
- d. Rencana tindak lanjut adalah membuat monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang selaku penanggung jawab dan pelaksana teknis penyelenggaraan pembangunan telah menyusun Ranwal Rencana Kerja untuk tahun 2022 dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang , pada intinya memuat Program / Kegiatan hasil rumusan, pembahasan dan kesepakatan Forum-SKPD.

Pada akhirnya Kami menyadari, bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMEDANG

Dadang Sulaeman, S.Sos.,M.Kes
NIP. 19701126 199303 1 006